

## DESA PENETAPAN

2024

PERDAKAB. SUMEDANG NO.2, LD 2024/NO.2. TLD NO. 43, HLM 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jumlah desa yang ada di Kabupaten Sumedang.

CATATAN

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2024.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
    - Produk Hukum Daerah yang memuat nama Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
    - Pelaksanaan perubahan nama Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal menjadi Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.
  - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.